

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 5
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020
Waktu : 10.45 s.d. Selesai WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Membahas:
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019;
 2. Subsidi Pangan pada APBN Tahun Anggaran 2021; dan
 3. Isu-Isu Aktual
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 44 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Budi Waseso (Direktur Utama Perum Bulog);
 2. Gatot Trihargo (Wakil Direktur Utama Perum Bulog);
 3. Tri Wahyudi Saleh (Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog);
 4. Bachtiar (Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog);
 5. Wibisono Poespithohadi (Direktur Pengadaan Perum Bulog);
 6. Bagya Mulyanto (Direktur SDM dan Umum Perum Bulog);
 7. Triyana (Direktur Keuangan Perum Bulog);
 8. Mansur (Direktur Komersial Perum Bulog).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun Anggaran 2021, dan Isu-Isu Aktual dibuka pukul 10.45 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Perum Bulog dalam optimalisasi penyerapan gabah/beras sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah/beras. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk memperkuat Cadangan Pangan Nasional dalam menghadapi krisis pangan dan kekeringan, dengan mengutamakan Perum Bulog dalam penugasan penyerapan pangan nasional.
2. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Perum Bulog yang telah menyelesaikan penyaluran Bantuan Presiden selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengembalikan peran Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi utama beras dalam program Bantuan Sosial Pemerintah serta penyaluran Natura untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran penyerapan dan penyaluran komoditas pangan strategis Perum Bulog dalam rangka melindungi harga di tingkat petani, mengatasi kelebihan hasil budi daya Pertanian Strategis Nasional, dan memperbaiki kebijakan pengelolaan cadangan pangan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk memberikan kewenangan yang seimbang kepada Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera membayar hutang penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog Tahun 2018-2019 sebesar Rp409.812.567.844,09 (empat ratus sembilan miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat koma nol sembilan rupiah) dan Cadangan Stabilitas Harga Pangan komoditas gula Tahun 2018-2019 dengan total sebesar Rp1.354.363.874.404,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat rupiah).
6. Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk memberikan jaminan pemberian keringanan bunga komersial kepada Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional.
7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan evaluasi atas Harga Penjualan Beras (HPB) yang dilakukan Perum Bulog dengan menghitung kembali selisih harga yang tepat dan sesuai, guna melindungi harga di tingkat petani.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Direktur Utama
Perum Bulog,

ttd

Budi Waseso

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

ttd

Sudin, S.E.

A-151